

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK TONTONAN DI KOTA PALEMBANG**



Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

**DIAH INDRI LESTARI
NIM 01071002067
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN**

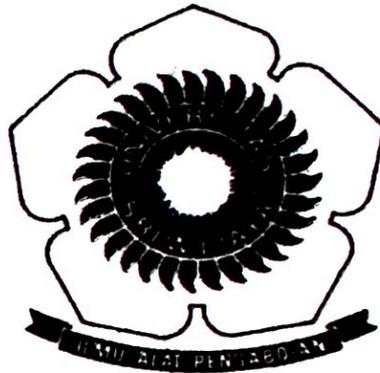
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2012

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK TONTONAN DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

**DIAH INDRI LESTARI
NIM 01071002067
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

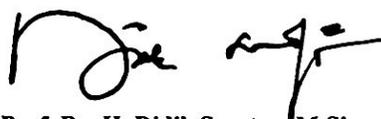
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DIAH INDRI LESTARI
NIM : 01071002067
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI : FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK TONTONAN DI KOTA
PALEMBANG

Telah diuji dalam ujian komprehensif tanggal 2 Februari 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 2 Februari 2012

Ketua,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP196007101987031003

Anggota,



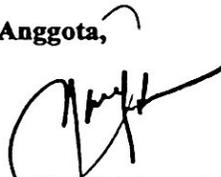
Bambang Bemby Soebyakto, M.A, Ph.D
NIP 195306161980111004

Anggota,



Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc
NIP 195710201984031002

Anggota,



Drs. Nazeli Adnan, M.Si
NIP 195804171988101002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Azwardi, SE, M.Si
NIP 196805181993031003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diah indri Lestari
NIM : 01071002067
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang Saya susun dengan judul:

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK TONTONAN DI KOTA PALEMBANG

Adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Palembang, Januari 2012

Pembuat Pernyataan



NIM. 01071002067

SURAT PERNYATAAN

Kami selaku dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi dari mahasiswa yang bernama di bawah ini:

Nama : Diah indri Lestari

NIM : 01071002067

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Tontonan Di Kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, Januari 2012

Pembimbing Skripsi,

Ketua

Anggota



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
196007101987031003



Drs. Bambang B. Soebyakto, M.A, Ph.D
195306161980111004

Motto :

“ Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar”

“Sesungguhnya kesabaran adalah jalan untuk mendapatkan keberhasilan yang pada akhirnya akan indah pada saatnya”

Kupersembahkan kepada :

- ❖ **Kedua Orang Tuaku yang selalu menyayangi ku dan mendoakanku**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Keponakanku yang tersayang**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Tim Pengajar, IESP & EP**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho Nya lah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Tontonan Film/Bioskop Di Kota Palembang”** di dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa begitu banyak kesalahan dan kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung sampai selesainya skripsi ini. Untuk itu sebagai rasa hormat, penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Syamsurijal, Ak. Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M. Si selaku dosen pembimbing pertama. Terimakasih selama bimbingan berupa ilmu yang di berikan oleh bapak kepada penulis.
3. Bapak Drs. Bambang B.Soebyakto., MA. Ph.D selaku dosen pembimbing kedua, terimakasih atas bimbingan bapak selaku pembimbing skripsi serta ilmu yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Drs. Fachrizal Bachri, M. Sc selaku dosen penguji dan dosen yang pernah mengajar dan membimbing penulis selama kuliah. Terimakasih atas semua bimbingan bapak selama ini kepada penulis.

5. Drs. Nazeli Adnan, M. Si, selaku dosen penguji dan dosen yang pernah mengajar penulis selama penulis menuntut ilmu di fakultas ekonomi. Terimakasih atas semua ilmu yang telah bapak berikan kepada penulis.
6. Bapak Drs. H. Tadjuddin Husin, M.S.c. selaku dosen pembimbing akademik terimakasih atas bimbingan dan nasihat kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus ini.
7. Dosen IESP, terimakasih telah memberikan ilmu kepada kami. Semoga ilmu yang berguna untuk kemudian hari, para Staf dan pegawai. Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini.
8. Buat keluargaku dan kedua orang tuaku. Terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
9. Buat teman-teman ku : Gatri, Dera, Vivi, Afif, Shela, Friska, Erni, Yosi, Kak Yuni, Mb Nita, Siti, Nana, Wiga, Chitra, Veny, Desti, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu terimakasih telah membantu penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini .

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta selalu meridhoi setiap langkah-langkah kita semua, amiin

Inderalaya, Januari 2012

Diah Indri Lestari

DAFTAR ISI

UPT PEPPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
No. DAFTAR	120949
TANGGAL :	29 MAY 2012
Halaman	

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1 PAD	8
2.1.2 Pajak	10
2.1.3 Pajak Daerah	12
2.1.3.1 Pajak Hiburan	16
2.1.3.1.1 Objek Pajak Hiburan	17
2.1.3.1.2 Subjek Pajak Hiburan.....	17

2.1.3.1.3	Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	17
2.1.3.1.4	Pajak Film	18
2.1.3.1.5	Objek Pajak Film	18
2.1.3.1.6	Subjek Pajak Film	18
2.1.3.1.7	Dasar Pengenaan Pajak Film.....	19
2.1.3.1.8	Pajak Tontonan	19
2.1.3.1.9	Subjek Pajak Tontonan.....	20
2.1.3.1.10	Objek Pajak Tontonan	20
2.1.3.1.11	Dasar Pengenaan Pajak Tontonan.....	20
2.2	Penelitian Terdahulu.....	21
2.3	Kerangka Pikir	25
2.4	Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1.	Ruang Lingkup Peneltian	27
3.2.	Sumber dan Jenis Data	27
3.3.	Batasan Operasional Variabel.....	27
3.4.	Teknik Analisis Data	29
3.4.1	Pengujian Asumsi Klasik.....	30
3.4.2	Pengujian Hipotesis.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		38
4.1	Hasil Penelitian	38
4.1.1	Gambaran Umum Kota Palembang	38
4.1.1.1	Penduduk	38
4.1.2	Kondisi Perekonomian Kota Palembang	41
4.1.1.2.	Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan PDRB.....	41
4.1.3	Kondisi Keuangan Kota Palembang.....	46

4.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah.....	46
4.1.3.2 Pajak Daerah.....	48
4.1.3.3 Pajak Hiburan.....	50
4.1.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi.....	55
4.1.4.1 Jumlah Gedung Bioskop.....	55
4.1.4.2 Jumlah Penonton.....	56
4.1.4.3 Besar Tarif Bioskop.....	58
4.2 Pembahasan	59
4.2.1.Pengujian Asumsi Klasik	61
4.2.1.1 Multikolonieritas	61
4.2.1.2 Autokorelasi.....	62
4.2.1.3 Heterokedastisitas.....	62
4.2.1.4 Uji T Statistik	63
4.2.1.5 Uji F Statistik.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Realisasi dan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2004 Sampai 2010	5
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2003 Sampai 2010.....	39
Tabel 4.2	PDRB Kota Palembang Berdasarkan Harga Konstan 2000	42
Tabel 4.3	Data Penerimaan Asli Daerah Kota Palembang.....	47
Tabel 4.4	Realisasi Penerimaan Daerah Berdasarkan Jenis Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Sampai 2010.....	49
Tabel 4.5	Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2005 -2010	50
Tabel 4.6	Penerimaan Pajak Tontonan Kota Palembang	52
Tabel 4.7	Jumlah Gedung dan Jumlah Teater di Bioskop Kota Palembang ...	56
Tabel 4.8	Jumlah Penonton tahun 2007 sampai 2011	57
Tabel 4.9	Besar Tarif Yang Ditetapkan oleh Pihak Bioskop	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan besar tarif, jumlah penonton dan jumlah bioskop terhadap Penerimaan Pajak perfilman di Kota Palembang	26
Gambar 3.1 Daerah Pengujian F- Distribution	36
Gambar 4.1 Grafik Penerimaan Asli Daerah Kota Palembang	47
Gambar 4.2 Grafik Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang	51

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tontonan di Kota Palembang. Faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan penerimaan pajak tontonan adalah jumlah bioskop, jumlah penonton dan besar tarif masuk atau harga tiket masuk. Hasil estimasi faktor –faktor tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pajak tontonan dengan Jumlah bioskop (x_1), jumlah penonton (x_2), dan besar tarif (x_3) adalah kuat peranan variabel pajak tontonan (Y) dalam menjelaskan variabel X ditunjukkan oleh koefisien determinasi parsial (R) sebesar 0.797. artinya 79.7% variasi total pajak tontonan mampu dijelaskan oleh variabel x sisanya 20.3 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang dimana dianggap konstan (*ceteris paribus*).

Kata Kunci : Jumlah bioskop, jumlah penonton, besar tarif, pajak tontonan.

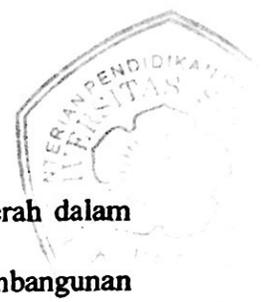
ABSTRACT

This research analyzed some factors that influenced the spectacle tax revenue in Palembang. The factors that had correlation with the spectacle tax revenue were the number of cinemas, the number of spectators, and ticket price. The results of factor estimation showed that there was strong correlation between spectacle tax with the number of cinemas (x1), the number of spectators (x2), and ticket price (x3). The role of spectacle tax (variable Y) in explaining variable X was shown by the coefficient of partial determination (R) was 0.797. This number meant that 79.7% total variation of spectacle tax was able to be explained by variable x. Meanwhile, the remaining of 23.3% was influenced by other variables excluded the models which were considered constant (*ceteris paribus*).

Keywords: the number of cinemas, the number of spectators, ticket price, spectacle tax.

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pembangunan daerah memberikan andil yang sangat besar terhadap daerah khususnya untuk daerah-daerah yang masih membutuhkan dana dalam pengembangannya. Pemerintah daerah juga memainkan perannya dalam hal pendapatan daerah. Salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah yang di peroleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Komponen-komponen yang ada di Pendapatan Asli Daerah ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan daerah, misalnya, tepat membayar pajak maka akan terkumpul dana pembangunan yang akan dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, sebab pembangunan tidak akan terlaksana apabila tidak tersedianya dana bagi daerah.

Dalam menggali potensi yang ada, pemerintah lebih menekankan pada wajib pajak, sebab pajak memiliki peran yang sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan daerah. Peranan pajak yang begitu besar dan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam hal pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi dari pajak menurut Sumitro (2002: 2) terbagi menjadi 4, yaitu :

a. Fungsi Anggaran.

Pajak sebagai fungsi anggaran adalah fungsi dari pajak itu sendiri untuk membiayai penyelenggaraan dan pengeluaran negara. Karena dengan seiring berjalannya waktu, pembangunan membutuhkan dana yang sangat banyak. Oleh sebab itu apabila penerimaan dari sektor perpajakan itu tidak mencukupi maka pembangunan akan terhambat.

b. Fungsi Mengatur.

Fungsi pajak sebagai fungsi pengatur adalah pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas.

Sebagai fungsi satabilitas, pajak memiliki peran yang sangat besar. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Retribusi Pendapatan.

Adalah bahwa pajak yang telah dipungut oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga terciptanya lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan.

Peranan pemerintah dan masyarakat dalam hal wajib pajak sangat diperlukan karena 80% dari penerimaan APBN dan APBD di terima dari pajak. Peran pajak antara lain untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat, selain sebagai alat untuk pengendali pengeluaran masyarakat, sebab pengeluaran masyarakat yang begitu cepat dapat menimbulkan inflasi.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak daerah atau kota dimana pajak kota lebih banyak dipungut oleh pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan dalam daerah lebih diutamakan dan difokuskan agar pembangunan di daerah dapat mencapai tujuan utama yaitu mensejahterakan masyarakat dan sebagai distribusi kekayaan bagi daerah.

Kota besar terdapat banyak tempat-tempat hiburan antara lain yaitu seperti mall, biliard, klub malam, bioskop, bowling, dan tempat hiburan lainnya, rekreasi atau sebagai tempat melepas penat. Kota Palembang merupakan Kota metropolitan, memiliki banyak tempat wisata dan hiburan yang dapat dijadikan sebagai pilihan bagi masyarakat. Bukan saja kalangan menengah keatas yang dapat menikmati tempat hiburan yang ada tetapi juga para remaja, anak muda dan orang dewasa, dan tempat hiburan yang mereka senangi adalah bioskop.

Gedung bioskop yang ada di Kota Palembang terdiri dari dua gedung bioskop yang terletak di *Palembang Indah Mall (PIM)* dan *International Plaza (IP)*. Gedung bioskop di IP relatif ramai tetapi tidak seramai yang ada di PIM. Hal ini dikarenakan PIM bukan hanya tempat untuk menonton tetapi juga untuk tempat berbelanja, yang menyatu dengan mall. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penonton untuk datang ke bioskop, antara lain :

- a) Film yang ditayangkan. Faktor ini menjadi hal yang utama bagi para penonton di mana mereka memilih ke bioskop dikarenakan film yang ditayangkan. Film yang menarik, bagus bagi penonton maka mereka akan memilih ke bioskop.

- b) Tarif yang ditetapkan. Besarnya tarif yang ditetapkan oleh pihak pengelola bioskop dapat menjadi daya tarik bagi penonton. Untuk hari senin sampai dengan kamis, pihak pengelola memberikan tarif yang murah sedangkan hari jumat, sabtu dan minggu pengelola menetapkan tarif yang sedikit mahal.
- c) Gedung bioskop, saling bersaing untuk menarik minat bagi pengunjung bioskop.
- d) Jumlah penonton. Jumlah penonton yang datang ke bioskop memiliki kenaikan dan penurunan yang berfluktuasi. Hal ini dikarenakan banyaknya alternatif pilihan tontonan yang dapat menggantikan.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penonton untuk datang ke bioskop dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak tontonan. Semakin besar penerimaan bioskop maka semakin besar pula penerimaan pajak tontonan yang dapat memberikan pengaruh terhadap pajak hiburan. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak tontonan melalui penonton bioskop. Dengan hanya memiliki dua gedung bioskop diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak tontonan agar penerimaan daerah dari segi hiburan dapat meningkat. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, banyak dari pihak-pihak yang menghasilkan barang substitusi sebagai pengganti ke bioskop. Misalkan saja dengan adanya *DVD*, *DVD compact*, *Home Teater*, dan sebagainya. Hal ini akan membuat para pengunjung untuk lebih memilih membeli kaset yang harganya relatif murah dan menonton di rumah daripada mereka harus mengantri dan menonton di bioskop dengan mengeluarkan sejumlah uang.

Selain dikarenakan film yang ada di bioskop, faktor kenyamanan dan keamanan yang dipilih oleh para penonton, juga menjadi salah satu alasan bahwa dengan menonton di rumah lebih santai dan aman. Alasan lain yang membuat masyarakat untuk lebih memilih menonton di rumah karena mereka lebih mampu untuk membeli kaset DVD yang harganya murah. Hal ini dapat mengurangi penerimaan pajak tontonan karena adanya pihak-pihak yang menjual kaset tersebut dengan cara membajak. Jika hal ini terus dibiarkan maka pemerintah akan mengalami kerugian. Pemerintah harus bertindak tegas agar penonton membeli kaset dengan yang asli atau original. Sehingga dapat juga membantu penerimaan pemerintah daerah itu sendiri.

Penerimaan bioskop yang baik akan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui pajak tontonan. Penerimaan daerah yang paling besar adalah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah termasuk didalamnya pajak hiburan yang terealisasi penerimaannya dari tahun 2004 sampai dengan 2010 sebagaimana yang digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Tabel Realisasi – Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2004 Sampai Tahun 2010

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Pencapaian (%)
2004	1.523.583.000	1.410.066.162	92,55
2005	1.750.000.000	1.533.294.553	88,76
2006	2.000.000.000	1.793.524.705	89,68
2007	2.400.000.000	2.624.997.097	109,37
2008	2.850.000.000	3.748.434.290	131,52
2009	3.270.000.000	4.366.158.504	133,52
2010	3.900.000.000	5.113.107.739	131,11

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2004 sampai 2010

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut diperoleh bukan saja dari

bioskop tetapi juga dari tempat-tempat hiburan yang lain, seperti diskotik, klub malam, biliyard, bowling, rekreasi air.

Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat besar, akibat dari banyaknya masyarakat yang memanfaatkan tempat-tempat hiburan di Kota Palembang. Hal ini dikarenakan banyaknya tempat-tempat hiburan yang telah dibuka dan menjadikan sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat setempat. Misalkan saja seperti tempat hiburan rekreasi air yang ada di Kota Palembang. Tempat ini dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat setempat untuk sekedar hiburan. Selain rekreasi air ada tempat menonon yaitu bioskop.

Oleh sebab itu diharapkan agar para pengelola tempat-tempat hiburan dapat selalu mengupayakan agar tempat hiburan mereka dapat menarik banyak masyarakat untuk menikmatinya sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kota Palembang. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan bahwa tarif yang dikenakan pada tempat-tempat hiburan adalah 35%. Penetapan tarif tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan daerah. Untuk tempat hiburan seperti bioskop dikenakan tarif 10%. Hal ini diharapkan dapat membantu penerimaan daerah melalui bioskop dengan tarif pengenaan pajak yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pajak hiburan khususnya pajak tontonan di Kota Palembang. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil judul : Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Tontonan Bioskop Di Kota Palembang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak tontonan di Kota Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak tontonan di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis, yaitu untuk menambah dan memperkaya akan bahan kajian mengenai faktor-faktor yang terkait dengan penerimaan pajak tontonan di Kota Palembang.
2. Manfaat Teoritis, yaitu untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori ilmu ekonomi khususnya dalam keuangan daerah yang telah dipelajari, serta memberi masukan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan penulis dan pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tontonan di Kota Palembang

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilana, Edith. 2010. *Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Hiburan Dan Retribusi Parkir Di Kota Surabaya*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur.
- Asngari, Imam. 2008. " *Modul Teori Dan Praktikum Ekonometrika*". Laboratorium Komputer. FE. Unsri.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Data Kependudukan Kota Palembang*.
_____ . 2010. *Data PDRB Kota Palembang*.
- Clark, Braedon. 1999. " *Using Tax Incentives to Encourage Investment in The Australian Film Industry*", Article 4. vol. 9. Bond University's.
- Deflanora, 2005. *Analisis Potensi Pajak Hiburan Kotamadya Jakarta Selatan* . Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dinas Pendapatan Daerah. 2010. *Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang*.
_____ . 2010. *Data Penerimaan Asli Daerah Kota Palembang*.
_____ . 2010. *Data Realisasi Penerimaan Daerah Berdasarkan Jenis Penerimaan Daerah Kota Palembang*.
_____ . 2010. *Data Penerimaan Pajak Tontonan Film/Bioskop Kota Palembang*.
- Fatchanie, Meutia. 2007. *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Sleman*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Gujarati D. 2003. *Basic Econometrica*. Forth Edition. Mc. Grow-Hill. International Edition.
- Halim, Abdul. 2001. *Anggaran Daerah dan "FISCAL STRESS" (Sebuah Studi Kasus Pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia)*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vo. 10. No. 4.
- Hidayat, Paidi. Dkk. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatra Utara*. Medan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 2. No. 3.
- Jones, Dow. 2009. Company. *Frist Green Film Studio in U.S. Financed Tax Credits From National New Markets Funds*. Diakses pada tanggal 19 Juni 2011 dari (<http://www.sdsgroup.com/pdf/Wall-Street-Journal-SLS-Article-090115.pdf>).

- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Penerbit : Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kawedar, Warsito. 2001. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ketiga. Penerbit ; Salemba Empat. Jakarta
- Masyuhi, Muhamad. 2010. *Analisis Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. IV. No. 1 & 2.
- Mangkusubroto, Guritno. 1998. *Penerimaan Pemerintah Untuk Membiayai Pengeluaran Pemerintah*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Novalita, Betta Sari, 2005 “Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor”, *Artikel Ekonomi*, Nomor 20200310, hal. 8.
- Novrianto, Harvi. 2007. *Evaluasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Penerbit : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Nurhayati, Siti. 2008. *Pendekatan QSPM Sebagai Dasar Perumusan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9. No. 1.
- Nurmayasari, Dini. 2007. *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 2. No. 1.
- PPFI, Blitzmegaplex, Produser Film dan Sumber-sumber lainnya. 2011. *Jumlah Gedung, Judul Film dan Jam Tayang, dan Daftar Film dan Jumlah yang Menonton*. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2011 dari (<http://filmindonesia.or.id/movie/viewers> dan www.21.cineplex.com)
- Putra, Sofyan Eko. 2007. *Optimalisasi ZIS dan Penghapusan Pajak: Sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*. Semarang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 8. No. 1.

- Ramdani, 2011. *Naikkan Pajak Impor Film Asing Dongkrak Film Indonesia*. Jakarta. Diakses pada tanggal 2 April 2011 dari (<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/02/206417/62/10/Naikkan-Pajak-Impor-Film-Asing-Dongkrak-Film-Indonesia>).
- Rahdina, D. P. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Riady, Indra. 2010. *Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektifitas Pajak Penenrangan Jalan Di Kabupaten Garut*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rombach, Jhon R. 2005. *Film And Video Tax Insentive Estimated Economic And Fiscal Impact*. LA: Legislative Fiscal Office Greg Alberch Chift Economist.
- Saleh, Samsubar. 2003. *Kemampuan Pinjaman Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia*. Semarang. Media Ekonomi dan Bisnis. Vol. XIV. No.2.
- Santosa, Purbaya Budi, Dan Retno Puji Rahayu. 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 2. No. 1.
- Saptutyingsih, Endah. 2003. *Dampak Perubahan Pengeluaran Wisatawan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia Pendekatan Structural Path Analysis (SAP) dan SNSE Indonesia*. Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 8. No. 1.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud. 2004. *Bunga Sampai Desentralisasi Fiskal*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Sihombing, Irvan. 2011. *Penyelesaian Kisruh Pajak Film Impor Segera Diumumkan*. Jakarta. Diakses pada tanggal 2 April 2011 dari (<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/213726/4/2/Penyelesaian-Kisruh-Pajak-Impor-Film-Segera-Diumumkan>).
- Siregar, Shelly. 2011. *Pengaruh Kenaikan Pajak Film Impor Luar Negeri*. Jakarta. Diakses pada tanggal 2 April 2011 dari (<http://vibizmanagement.com/journal/index/catagory/tax-accounting/916>).

- Sriyana, Jaka. 2008. *Dampak Transisi Demografi Terhadap Defisit Fiskal di Indonesia*. UII. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 13. No. 3.
- Sumitro, Rocmad. 2002. *Modul 1; Pengertian dan Fungsi Pajak*. Pusat Pengembangan Bahan Ajar – UMB.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik (Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah)*. Penerbit : Andi. Yogyakarta.
- Sutawijaya, Adrian. 2004. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tanah Sebagai Dasar Penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB di Kota Semarang*. UT. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9. No. 1.
- Syahroza, Akhmad. 2007. *Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 8. No. 1.
- Wachdin, Faizah. 2010. *Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur.
- Waluyo, Joko. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia*. Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 4. No. 1.
- Waluyo, Wirawan dan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Young dan Ernest. 2009. *Economic and Fiscal Impacts of the New Mexico Film Production Tax Credit. Prepared for the New Mexico State Film Office and State Investment Council*. Di ambil pada tanggal 15 Maret 2012 dari http://blogs.courant.com/rick_green/ErnstandYoung.pdf
- Zandjani, Tubagus Chairul Amachi. 1992. *Perpajakan*. Cetakan pertama. Penerbit: PAU – EKUL kerjasama sama dengan PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.